Pungutan Orang Tua Siswa

Penulis : Kisar Rajaguguk

**DEPOK--MI:** Memasuki penerimaan murid baru Tahun Ajaran (TA) 2008/2009 Komisi D DPRD Kota Depok bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat memperingatkan seluruh pengelola pendidikan tidak boleh memungut biaya pendaftaran, sumbangan pendidikan, rehab gedung sekolah, modul mata pelajaran, dan alat tulis kantor (ATK) dari orang tua murid.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP Raden Sugiharto disela-sela rapat kerja PDIP Kota Depok dalam rangka pemenangan pemilu dan pilpres 2009, memperingati HUT PDIP ke-35, dan 100 Tahun kebangkitan nasional, di Sawangan Golf, Kota Depok, Minggu (22/6).
"Saya peringatkan para pendidik di sekolah-sekolah, jangan memanfaatkan jabatan dan kedinasan dalam mendapatkan laba dari orang tua siwa," tegas Sugiharto. Ia menambahkan tugas guru bukan mencari laba tapi adalah mendidik siswa seutuhnya agar kelak menjadi orang yang beguna untuk bangsa dan negara.
Apa kata dunia, kalau orang tua siswa terus menerus dipunguti biaya macam-macam setiap tahun ajaran baru tiba. Padahal pemerintah daerah (Pemda) Kota Depok maupun Departemen Pendidikan Nasional mensubsidi biaya pendidikan sekolah lewat bantuan operasional sekolah (BOS).

*Begitu juga dengan rehab gedung sekolah, bangku, meja, papan tulis yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan, modul mata pelajaran dan ATK sekolah dibiayai APBD. ” APBD pendidikan tujuannya untuk mengurangi beban orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, ” imbuh Sugiharto.
Sugiharto menjabarkan pada Selasa (6/5) lalu, Pemerintah Kota Depok telah mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBD sebesar Rp26 miliar guna diserahkan kepada 232 ribu siswa Sekolah dasar Negeri dan Swasta yang tersebar di 63 kelurahan, enam kecamatan.
Setiap siswa akan menerima dana BOS itu sebesar Rp10 ribu per bulan dengan harapan agar kegiatan belajar para siswa tidak terhambat. Dipihak lain adalah untuk mengurangi beban para orangtua dalam kegiatan belajar anaknya.*

 **Budi Hartono, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, jika ada sekolah yang rusak dan butuh perbaikan, sebaiknya diajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot). “ Semua itu sudah menjadi kewajiban Pemkot, jadi sekolah tidak perlu meminta uang pembangunan sekolah,” kata Imam.**

Dia menambahkan, dewan banyak menerima keluhan masyarakat terkait biaya pendidikan di Depok. Termasuk dana sumbangan pendidikan (DSP) untuk SD. Untuk mengatur dan melindungi permasalahan ini, dewan membutuhkan masukan dari masyarakat berupa pengajuan Perda Pendidikan.

**Latihan 8 :**

1. bukalah ms. Word anda
2. Ketiklah teks dibawah sesuai dengan format contoh

Dewan Hakim PB PON XVII Layangkan Surat Peringatan Keras ke Pencak Silat

Penulis : Irvan Sihombing

**SAMARINDA--MI:** Dewan Hakim PB PON XVII Kalimantan Timur melayangkan surat peringatan keras kepada Panitia Pertandingan dan *technical delegate* cabang olah raga pencak silat. Surat ini keluarkan setelah Dewan Hakim menyidangkan banding yang diajukan sejumlah kontingen peserta pencak silat, Senin (14/7).
Dewan Hakim mendesak agar juri atau wasit pencak silat senantiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. "Panitia pertandingan dan *technical delegate* cabang olahraga pencak silat harus mengingatkan para juri atau wasit pertandingan agar senantiasa bersungguh-sungguh dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya. Mereka juga harus selalu mengingatkan juri atau wasit agar memegang teguh janji profesi seorang wasit," ujar Sekretaris Dewan Hakim PB PON Faisal Abdullah kepada *Media Indonesia*.

Faisal menambahkan, dalam memimpin pertandingan, wasit harus lebih mengedepankan kepentingan pembinaan olahraga prestasi nasional dari pada kepentingan perolehan medali untuk provinsi tertentu. Menurutnya, surat peringatan keras ini dilayangkan berkenaan dengan banyaknya pengaduan dari kontingen peserta PON. Mereka adalah NTB, DKI Jakarta, Sumatra Utara dan Jawa Tengah. "Dalam dua hari ini, Dewan Hakim menerima surat pengaduan dari sejumlah kontingen peserta pencak silat," ujarnya.

Saat ditanya apakah Dewan Hakim bisa menganulir keputusan wasit yang memenangi tuan rumah Kalimantan Timur, Faisal mengatakan itu sulit dilakukan. "Dewan Hakim kesulitan dalam mengintervensi keputusan tersebut. Sebab, hampir semua kasus yang terjadi berkaitan dengan masalah teknis pertandingan. Jika ini yang terjadi, putusan akhir terletak di tangan *technical delegate*.
Begitulah bunyi peraturannya. Makanya, kami melayangkan surat peringatan keras karena  ada beberapa pertandingan dalam cabang olahraga ini yang nyata-nyata tidak dinilai dengan baik," urainya.

Sebelumnya, Ketua *Technical Delegate* Pencak Silat PON XVII Tafsil Rimzal membantah wasit telah bersikap tidak adil dalam memimpinnya. Menurut Tafsil, banyaknya protes terhadap keputusan wasit terjadi karena pihak-pihak yang keberatan tidak mengetahui dengan pasti prosedur penjurian. "Soal ketidakpuasan dalam pertandingan itu sebenarnya hal biasa. Tetapi, saya melihat wasit dan juri dalam mengambil keputusan sudah sesuai prosedur. Kita tidak bisa melihatnya setengah-setengah dan harus melihat rentetan dan detail peristiwa," ujarnya kepada wartawan, Minggu (13/7).
Tafsil mengatakan itu saat ditanya perihal peristiwa kericuhan yang terjadi saat pesilat Kalimantan Timur M. Sodiq. Wasit menyatakan tendangan Sodiq ke pesilat DKI Jakarta Johannes Edi adalah sah. Namun, kubu DKI Jakarta menilai tendangan itu tidak sah karena Sodiq terlebih dahulu memukul rahang Johannes. Protes akhirnya dilayangkan kepada wasit. Sebab, pukulan tersebut dilarang dalam Pencak Silat. Namun, pihak pengadil tetap menyatakan sah dan memberi Sodiq kemenangan mutlak.

DAMPAK PEMBATASAN BBM

Musibah berupa bencana alam yang bertubi-tubi melanda negeri akhir-akhir ini melumpuhkan gerak sendi-sendi perekonomian dan berdampak pada kehidupan bermasyarakat.
Kerugian yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat adalah berkurangnya produksi beras dan kenaikan harga sembako. Barang-barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok lain produksi dunia perindustrian berkurang pula karena lumpuhnya kegiatan akibat bencana tadi.

Ancaman krisis tersebut ditanggulangi pemerintah dengan program stabilisasi harga. Tapi program yang dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi rakyat itu bukan tidak mungkin justru menimbulkan akibat sebaliknya, memperberat impitan yang mendera kehidupan rakyat.
Pemikiran ini dilandasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dana Rp20 triliun untuk mendukung program tersebut sebelumnya diperuntukkan bagi subsidi BBM jenis minyak tanah, solar, dan premium Rp10 triliun serta subsidi listrik Rp10 triliun.

***Pembatasan pembelian*** *Pemerintah berencana membatasi pembelian solar dan premium dengan kartu kendali. Berapa pun pembatasan pembelian solar dan premium untuk kendaraan angkutan umum dan barang yang ditetapkan nanti, barang dan jasa produksi dunia perindustrian akan berkurang karena membengkaknya biaya produksi. Sebab, untuk mencukupi keperluan bahan bakar kendaraan operasional, produsen terpaksa membeli pertamax yang harganya lebih mahal daripada premium.*

**Program pemerintah dengan membatasi pembelian solar dan premium bersubsidi itu justru mengakibatkan bertambah langka dan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Pencapaian program itu paling-paling hanya sebatas pada kestabilan harga yang masih di atas jangkauan daya beli masyarakat.
Dengan demikian, kemakmuran rakyat yang seharusnya diwujudkan menggunakan minyak bumi yang merupakan sebagian dari kekayaan alam kian jauh dari kenyataan. Lebih-lebih kalau diperhitungkan dampak yang timbul dari pengurangan subsidi listrik dan konversi minyak tanah ke gas yang sebelumnya juga ditetapkan yang dilengkapi kartu kendali pembelian minyak tanah dengan uji coba di Jawa dan Bali.
Dengan timbulnya sederetan bencana alam plus krisis pangan minus subsidi BBM dengan dampak tersebut, lengkaplah musibah yang kini melanda negeri ini yang semakin menjauhkan amanat UUD 1945 untuk memakmurkan rakyat.**

Amanat UUD 1945 untuk memakmurkan rakyat dengan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi itu terlupakan. Penggagas kebijakan pengurangan subsidi BBM dengan membatasi pembelian BBM sepertinya terpaku pada pemikiran hanya memperkecil dana yang semula diperuntukkan subsidi bahan bakar, tanpa memperhitungkan dampaknya.
Seiring dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia yang mencapai lebih US$140 per barel, meningkat pula harga seluruh jenis BBM, di antaranya premium. Sebab, bahan bakar ini disuling dari petroleum impor yang harganya terus meningkat itu.

Mahalnya harga BBM logikanya bisa ditanggulangi dengan merenovasi instalasi penyulingan sedemikian rupa sehingga dapat menyuling petroleum hasil pengeboran domestik. Dengan demikian, harga BBM dapat menurun dan ditekan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat tanpa subsidi lagi. Menurunnya harga BBM dengan sendirinya menurunkan pula biaya produksi yang kemudian juga menurunkan harga barang-barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok masyarakat.

PAKAR-PAKAR TEKNOLOGI PERMINYAKAN TENTUNYA BERPOTENSI MERENOVASI INSTALASI PENYULINGAN TERSEBUT, KALAU PEMERINTAH MEMANG BERKEHENDAK POLITIK DEMIKIAN. KALAU TIDAK, BISA MENGUNDANG PEMIKIRAN MIRING, APAKAH 'ADA UDANG DI BALIK BATU' YANG BERKAITAN DENGAN KESAN PEMARGINALAN PENGETAHUAN MASYARAKAT LUAS TENTANG SELUK-BELUK BBM, DENGAN MOTIVASI PEROLEHAN KEUNTUNGAN ILEGAL BAGI PIHAK-PIHAK TERTENTU.

**Latihan 1 :**

1. Buatlah folder anda dengan nama “belajar” pada folder mydocument :
2. Kemudian gantilah nama folder tersebut menjadi “percobaan”
3. Tutuplah windows explorer

**Latihan 2 :**

1. Bukalah windows explorer
2. Hapuslah folder percobaan tadi
3. Buatlah folder baru dengan nama “aku”
4. Tutuplah windows explore

**Latihan 3 :**

1. Bukalah windows explorer
2. Copylah folder aku tadi menjadi 3 folder baru yaitu aku1, aku2 dan aku3
3. Tutuplah windows explorer.

**Latihan 4 :**

1. Bukalah microsoft word
2. ubahlah ukuran kertas menjadi hvs
3. ubahlah page setup dari kertas yaitu :
4. Top = 4; left = 3; right = 3 dan bottom =4
5. ubalah tata letak dari kertas menjadi landscape
6. Ketiklah teks dibawah

Komputer dapat Meramalkan Kematian

**PARIS--MI:** Suatu program komputer yang di rancang oleh para peneliti Amerika
Serikat dapat meramalkan kematian dengan akurasi yang menakutkan bagi beberapa orang
Amerika yang akan menjalani hukuman mati.

Faktor utama yang menentukan kematian seseorag bukan keturunan atau kemiskinan, tetapi pendidikan -- semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi peluang kematian.

Lebih dari 3.200 laki-laki dan perempuan di penjara Amerika Serikat telah ditakdirkan untuk mati. Beberapa di antaranya telah berada di jalur kematian dalam beberapa dekade ini, namun persentasenya relatif kecil -- hanya 53 orang pada 2006.

Pada penelitian sebelumnya telah membantah bahwa orang kulit hitam secara tidak proporsional paling banyak dijatuhi hukuman mati di Amerika Serikat. Tetapi dengan penelitian kecil dapat terlihat apakah ada beberapa prasangka dalam mengambil keputusan seseorang yang akan dijatuhi hukuman mati.

Stamos Karamouzis dan Dee Wood Harper dari Universitas Texas di Texarkana, Amerika Serikat memakai alat penghitung yang diperagakan pada otak manusia, dengan membuat jaringan-jaringan syaraf yang buatan (Ann), untuk mencari pola yang dapat dihubungkan dengan pelaksanaan eksekusi